

PRESS RELEASE MUSRENBANG JATIM 2017

MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA MENINGKATKAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMBIAYAAN DI JAWA TIMUR

Era Baru Pembangunan Partisipatoris Jawa Timur telah mulai berkembang; ditandai dengan banyak dan beragamnya aspirasi masyarakat; seperti yang teraktualisasi dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Timur tahun 2017. Dalam kesempatan ini **Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo** mengarahkan bahwa melalui Musrenbang yang dilakukan dari tingkatan Desa hingga Provinsi ini, tak kurang dari 510 ribu orang telah melakukan musyawarah guna menentukan arah pembangunan di tahun 2018. Realita inilah yang menjadikan Musrenbang di Provinsi Jawa Timur sebagai Musrenbang terbesar di Indonesia. Musrenbang dengan pendekatan partisipatoris ditransformasikan kepada kinerja dan perencanaan pembangunan bidang politik, bidang hukum, bidang keamanan, bidang sosial-budaya dan bidang ekonomi.

Gubernur Jawa Timur juga menyampaikan bahwa untuk pembangunan bidang keamanan Jawa Timur menggunakan konsep 3 Pilar plus Toga dan Tomas, berhasil mewujudkan kondisi keamanan, kriminalisasi dan demo yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Stabilitas keamanan tersebut mendorong pembangunan bidang hukum diarahkan guna merealisasikan konsepsi “hukum memfasilitasi pembangunan” dengan lebih konstitusional, partisipatoris, mempertimbangkan budaya dan sosiologi masyarakat guna mencapai kesejahteraan. Pembangunan Ekonomi ditandai akselerasi pertumbuhan tahun 2016 di atas pertumbuhan ekonomi Nasional. Akselerasi pertumbuhan Jawa Timur ini ternyata juga berkualitas mempengaruhi pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pengurangan disparitas antar wilayah serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Kinerja inilah yang mengindikasikan kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terkategori inklusif. Pada sisi yang lain Provinsi Jawa Timur juga terindikasi mempunyai daya saing tertinggi kedua di seluruh Indonesia (setelah DKI Jakarta), memiliki stabilitas makro ekonomi, perencanaan pemerintahan dan institusi, keuangan Bisnis dan tenaga kerja, kualitas hidup dan pengembangan infrastruktur.

Tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke depan adalah Dinamika Global seperti *Fed Fun Rate* (FFR), *Trump Effect* serta liberalisasi perdagangan lainnya, berdampak pada kinerja melambatnya sektor perdagangan dan investasi. Tantangan lainnya adalah fenomena *middle income trap* yang diindikasikan

dengan terjadinya pertumbuhan industri lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi induknya, kompetensi tenaga kerja yang masih rendah, rendahnya konektivitas logistik, rendahnya realisasi investasi, dan kurang berkembangnya industri ekonomi kreatif. Tantangan middle income trap ini perlu dijawab dengan pertumbuhan industri yang harus tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi induknya, peningkatan kualitas SDM, peningkatan konektivitas infrastruktur logistik, optimalisasi investasi yang masuk dan mendorong pertumbuhan wirausaha ekonomi kreatif baru.

Melihat tantangan tersebut Strategi Dasar Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2018 adalah melalui pembangunan infrastruktur baik *Soft Infrastructure* maupun *hard Infrastructure*. Pada Strategi *soft infrastructure* pengembangan SDM difokuskan pada pendidikan vokasional (30 % SMA : 70 % SMK), SMK Mini, BLK Plus, Poltek D3 dan *community college*. Diikuti pula dengan strategi Reformasi Birokrasi dengan yang lebih menekankan 8 area perubahan meliputi Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tata Laksana, SDM ASN, Peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Melalui Reformasi Birokrasi ala Jawa Timur 8 area Perubahan tersebut diformulasikan kembali kedalam : Regulasi + SDM (leadership) + Teknologi Informasi + Kontrol; sehingga pelayanan publik lebih terealisasi prima.

Sedangkan arah Pembangunan *hard infrastructure* dilakukan melalui pembangunan prasarana wilayah yang antara lain meliputi pembangunan jalan tol Trase Mantingan – Kertosono, Kertosono – Mojokerto, Mojokerto – Surabaya (Bulan Juni 2017 dapat dilalui untuk hari raya : 1 lajur), Krian – Legundi – Bunder, Gempol – Pasuruan (masih ada lahan yang belum terbebaskan) , Pandaan – Malang (Agustus 2018 sampai di Purwosari), Gempol – Pasuruan, Pasuruan – Probolinggo (Realisasi Pembebasan tanah 93 %, fisik 18 %), Probolinggo - Banyuwangi (melewati lahan yang dipergunakan untuk latihan perang sehingga perlu pertimbangan yang lebih cermat dari TNI), kemudian Jalan Tol Inisiasi pada trase Tuban-Gresik, Gempol-Mojokerto, Sukorejo-Batu, Pembangunan Jalan Nasional/Strategis Nasional Non Tol : percepatan penyelesaian JLS pada trase Munjungan-Prigi, batas Tulungagung – Kab Blitar-Balekambang Malang, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kereta Api antar Kota (Jakarta – sby, Surabaya – Banyuwangi); *Double Track KA Elevated* terintegrasi dengan Pengembangan Bandara Internasional Juanda (mengarah *triple run way*), Pengembangan Bandara Internasional Abdur Rahman Saleh, Pembangunan Bandara di Kediri; Pembangunan beberapa Pelabuhan baru dan Peningkatan kapasitas Pelabuhan Paciran, Pelabuhan Prigi Trenggalek, Pelabuhan Tanjung Awar-awar, Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Brondong Lamongan, Pelabuhan Boom Banyuwangi, Pembangunan SPAM Umbulan.

Realisasi dari rencana Pembangunan Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja Industri dan Perdagangan. Saat ini share Industri pengolahan Jawa Timur terhadap nasional 21,08 %, merupakan kontribusi industri tertinggi di Indonesia. Dalam konteks inilah menjadikan Jawa Timur sebagai Provinsi Industri, yang diproyeksi masih memerlukan penyediaan kawasan industri seluas 31.584,78 Ha di Gresik, Jombang, Tuban, Kota Malang, Lamongan, Banyuwangi, Mojokerto, Bangkalan dan Madiun (dari kondisi eksisting kawasan industri seluas 4.759,5 Ha). Dilakukan pula Strategi memperkuat basis industri melalui pemilihan jenis industri primer yang memiliki daya saing untuk diberikan fasilitas kredit murah, standarisasi, akses pasar, teknis produksi dan pelatihan ekspor. Melalui Fasilitas sektor perdagangan Industrialisasi di Jawa Timur di distribusikan pemasarannya melalui penguatan 26 Kantor Perwakilan Dagang, Pameran dan Misi Dagang. Di Luar negeri penguatan pasar ekspor dilakukan melalui etalase perdagangan di Tianjin - China, Osaka-Jepang, Gyong Nam – Korea Selatan, Belgia, Swiss dan Singapura (Jatim mart). Fasilitas pemasaran tersebut pada tahun 2016 menghasilkan surplus nett ekspor sebesar Rp. 100,56 T. Melalui penerapan teknologi IT : Dashboard Expor-Import Jatim, pada tahun 2018 diharapkan kinerja nett ekspor akan lebih besar lagi.

Guna menunjang strategi sektoral, dilakukan pula efisiensi pembiayaan pembangunan yang tidak lagi mengandalkan pembiayaan APBD saja, namun sudah selangkah untuk mengoptimalkan pembiayaan pembangunan non APBD. Hal ini dilatarbelakangi oleh kinerja perbankan yang pada tahun 2016 pertumbuhan DPK-nya bergerak lambat, LDR masih terindikasi Prudent, NPL Bank Umum dan Syariah masih normal. Dengan kondisi itu landing kredit perbankan cenderung menurun, sedangkan *idle money* cenderung membesar. Strategi pembiayaan non APBD ke depan dilakukan melalui skema *Business to business* (PT SMI, PNM), *public private partnership* (Umbulan), *loan* serta pendanaan-pendanaan lain seperti skim pembiayaan Syariah yang mengandalkan modal social (social capital).

Dalam kesempatan ini **Mendagri Cahyo Kumolo** memberikan pengarahannya, utamanya terkait sinergitas RKP dengan RKPD Jawa Timur tahun 2016 adalah

- 1. Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman;** meliputi Akses KA menuju Teluk Lamong (DED); Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut di Taddan; Pengembangan Bandar Udara Sumenep; Pembangunan/Reaktivasi Tramway Kota Surabaya; Pembangunan Jalur Ganda Kedungbanteng-Madiun (SBSN); Engineering Services of Surabaya Regional Railway Line; Pembangunan Jalur Ganda Lintas Solo-Surabaya antara Madiun-Jombang (SBSN).
- 2. Pendidikan, meliputi :** Pembangunan kampus baru Akademi Perkeretaapian Madiun; Pelatihan vocational bagi SDM KUMKM

3. **Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan**, meliputi kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Surabaya; Pengawasan Izin Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Penerapan Sanksi Administrasi; Operasionalisasi Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang
4. **Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata**, meliputi kegiatan Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata Bromor Tengger Semeru melalui Pendampingan Masyarakat dan Gerakan Sadar Wisata, Ketahanan Pangan, Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Sarpras Produksi Garam Rakyat (geomembran gudang garang rumah prisma); dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Pulau Jawa Bali.
5. **Pembangunan Wilayah**, meliputi kegiatan Penyusunan Rancangan Masterplan Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kab. Pamekasan; Fasilitasi usulan perhutanan sosial; Pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan, dan Penanggulangan Kemiskinan
6. **Penanggulangan Kemiskinan**, meliputi kegiatan Bantuan Pangan melalui Voucher/ Layanan Keuangan Digital di Kab. Blitar; Fasilitasi sertifikasi SVLK bagi UMKM; Pemberian Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas; Peserta pelatihan kewirausahaan; Peserta pelatihan technopreneur; Fasilitasi inkubator bisnis dan teknologi; Petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL); dan Pelatihan perkoperasian.
7. **Pembangunan Wilayah**, meliputi kegiatan Penyusunan Rancangan Masterplan Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kab. Pamekasan; Fasilitasi usulan perhutanan sosial; dan Pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan
8. **Prioritas Nasional Bidang Kesehatan**, meliputi kegiatan Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta; Pembangunan bank sampah kapasitas 20 ton/hari di Kab. Malang dan Kota Surabaya; Penghapusan penggunaan merkuri di Kab. Pacitan; dan Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 di Kab. Malang dan Kota Surabaya.
9. **Ketahanan Energi**, melalui Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kab. Sidoarjo, Kab. Tuban, dan Kota Pasuruan;
10. **Perumahan Permukiman** meliputi kegiatan : Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Kendaraan di Kab. Gresik, Pengeboran Air Tanah (Sumur Bor) di Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro, Kab. Bondowoso, Kab. Jember, Kab. Jombang, Kab. Kediri, Kab. Sampang, Kab. Sumenep, dan Kab. Trenggalek.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengarahkan kebijakan belanja negara tahun 2018, meliputi :

- 1) Peningkatan belanja modal dan efisiensi belanja barang untuk memperbesar belanja produktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan;
- 2) Akselerasi pengurangan kesenjangan dan kemiskinan antara lain melalui efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi tepat sasaran, serta peningkatan kualitas desentralisasi fiskal melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan review besaran bantuan, serta sinergi antara program yang relevan;
- 3) Peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan kualitas dan akses pendidikan, layanan kesehatan;
- 4) Mendorong kesejahteraan pegawai/pensiunan sejalan dengan UU No.5 tahun 2014 tentang ASN dalam rangka efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 5) Pengembangan sektor unggulan (ketahanan pangan, ketahanan energi, kemaritiman, pengembangan sektor pariwisata dan industri) melalui al. pembangunan bendungan, irigasi, ketenagalistrikan, jalan, bandara, pelabuhan, pengembangan kawasan industri;
- 6) Menjaga stabilitas ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik;
- 7) Mendukung pengalokasian dana untuk mengantisipasi ketidakpastian dan penanganan bencana alam serta pelestarian lingkungan.

Drs Suyoto, MSi. (Kang Yoto) Bupati Bojonegoro yang diberikan kesempatan menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam keterkaitan tema RKPD Jawa Timur 2018 menambahkan bahwa Pembangunan infrastruktur diarahkan pada efektifitas arus orang, barang dan jasa meliputi :

- Percepatan aksesibilitas, dan peningkatan daya saing daerah kabupaten/kota
- Konektivitas kewilayahan ke sentra produksi , wisata, industri dan perdagangan
- Infrastruktur yang mendukung percepatan industri manufaktur (kelistrikan, pertambangan)
- Infrastruktur yang mendukung peningkatan daya saing, skill dan kompetensi Sumber Daya Manusia

Infrastruktur yang digunakan dalam memudahkan pertumbuhan ekonomi adalah pariwisata, sehingga perlu penguatan produk wisata, redistribusi industry padat karya (6 insentif : perizinan, infrastruktur, Upah Umum Perdesaan (UUP), Biaya training, tax holiday, non CSR), layanan pendidikan dan kesehatan : SDM terampil, industry jasa pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu **Menteri Bappenas Prof Dr. Bambang B.** menyampaikan arahan bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 telah disepakati beberapa Prioritas Nasional yaitu antara lain (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Perumahan dan Permukiman; (4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; (5) Ketahanan Energi; (6) Ketahanan Pangan; (7) Penanggulangan Kemiskinan; (8) Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; (9) Pembangunan Wilayah; (10) Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. Keseluruhan prioritas nasional tersebut didukung oleh beberapa pengarusutamaan yaitu revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun dalam mendukung Tema RKPD Jawa Timur 2018, beberapa kegiatan strategis nasional yang akan dilaksanakan seperti Pembangunan Jalur Ganda Lintas Solo-Surabaya antara Madiun-Jombang (SBSN) dan Kedungbanteng-Madiun (SBSN). Pembangunan Jalan Tol meliputi: Jalan Tol Pandaan-Malang, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, Mojokerto-Surabaya, Gempol-Pasuruan; Pembangunan Jalan Non Tol Fly Over dari dan menuju Teluk Lamong. Peningkatan Kapasitas/Rekonstruksi Jalan Kertosono – Mantingan dan Kertosono – Kediri, yang merupakan proyek-proyek untuk mendukung kegiatan prioritas konektivitas nasional. Sedangkan pembangunan Bendungan Tugu, Semantok, Gongseng, Tukul dan Bagong dilaksanakan untuk mendukung kegiatan prioritas nasional ketahanan pangan. Disamping itu terdapat proyek pembangunan kilang minyak Tuban untuk mendukung ketahanan energi dan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan untuk mendukung penyediaan air minum di 5 (lima) Kabupaten/Kota. Selain itu, terdapat berbagai rencana indikatif pembangunan infrastuktur lainnya yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi Jawa Timur.